

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.¹ Masalah krusialnya ada di pengelolaan limbah yang belum optimal, yang berakhir menjadi timbunan dan lama-kelamaan akan menghasilkan gas metana dapat merugikan lingkungan. Setiap tahunnya, Indonesia memproduksi 3,2 juta ton sampah plastik yang pengelolaan belum dilakukan secara maksimal, sehingga 1,29 juta ton seringkali berakhir di lautan. Disamping itu, setiap tahunnya terdapat 85.000 ton kantong plastik juga dilepaskan ke lingkungan lokal. Sampah plastik yang tak dikelola ini akhirnya berdampak pada sungai dan lautan di Indonesia dan menjadi akar dari permasalahan lingkungan.²

Akibat terbatasnya sumber daya dan peraturan yang berlaku, seringkali menyebabkan pengolahan limbah padat secara ilegal, seperti pembakaran sampah secara terbuka maupun perilaku membuang sampah ke sungai yang berpotensi mencemari lautan. Hal ini tentunya menjadi masalah yang krusial untuk pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Ditambah lagi dengan masalah pengelolaan limbah, baik dalam skala rumah tangga maupun industri yang menjadi masalah yang semakin serius setiap harinya akibat regulasi dan supervisi transfer limbah yang

¹ Binus University, "Indonesia Negara Pemroduksi Sampah Terbanyak Nomor 2 Di Dunia. Mengapa?," n.d., <https://binus.ac.id/knowledge/2019/11/indonesia-negara-pemroduksi-sampah-terbanyak-nomor-2-di-dunia-mengapa/>.

² Widiyanto Saputro, "Pengelolaan Sampah Nasional Dengan Pola Ekonomi Sirkuler Menuju Net Zero Waste Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2023, 1–144.

tidak memadai. Hal ini diperparah dengan kecerobohan segelintir pihak yang cenderung memilih untuk membakar atau menumpuk sampah di TPA daripada mengelolanya dengan baik dan menggunakannya untuk industri hijau.

Plastik *low-value*, atau plastik bernilai rendah, adalah jenis plastik yang sulit untuk diolah karena berat jenisnya yang ringan serta membutuhkan biaya yang mahal, berbanding terbalik dengan nilai jualnya yang rendah di pasar daur ulang. Contoh umum plastik *low-value* termasuk kemasan sekali pakai seperti styrofoam, bungkus sachet, kantong plastik, sedotan, gelas, peralatan makan plastik, dan plastik film tipis³. Dalam manajemen sampah, plastik jenis ini seringkali menjadi masalah besar, hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas daur ulang yang memadai, keterbatasan teknologi, dan biaya operasional, karena tidak semua fasilitas daur ulang dapat memproses jenis plastik ini. Maka dari itu plastik jenis ini seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau mencemari lingkungan, seperti sungai, laut, atau area terbuka, karena sulit didaur ulang.⁴

Masalah persampahan ini merupakan tantangan besar Indonesia dalam menghadapi peningkatan volume sampah padat dan sampah laut yang tidak terkelola. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia juga belum sepenuhnya maksimal dan terkesan lamban. Bahkan, sebagian kota-kota besar di Indonesia, permasalahan sampah menjadi semakin serius dikarenakan banyaknya TPA yang sudah *overcapacity* dalam menampung sampah harian. Hal tersebut yang menjadi dorongan pemerintah untuk memberikan solusi dengan mengeluarkan Perpres No.

³ Embassy of Norway, “No Title,” 2024, https://www.instagram.com/norwayinindonesia/p/C7xw4cCyW-j/?img_index=1.

⁴ ICCWTE, “The Connotation and Classification of Low Value Recyclable Materials,” 2020, <https://www.iccwte.org/index/article/iccwte/id/533.html>.

97 tahun 2017 mengenai kebijakan nasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga⁵ dan Perpres No.83 Tahun 2018 mengenai penanganan sampah laut.⁶ Peraturan tersebut merujuk dan lahir sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah untuk penanganan persampahan. Peraturan tersebut ditargetkan dapat mengalokasikan, mengelola, dan menjadikan timbunan sampah menjadi hal lebih bermanfaat.

Selain pembuatan regulasi, pemerintah dituntut untuk mengatasi masalah persampahan dengan cara alternatif, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain, baik dengan lembaga maupun korporasi luar negeri.⁷ Kerja sama internasional merupakan perilaku oportunistik dalam mengejar tujuan yang saling menguntungkan atau mengatasi masalah yang dialami suatu negara. Kerja sama internasional melibatkan koordinasi kebijakan, strategi, dan tindakan di berbagai sektor baik ekonomi, politik lingkungan, sosial, dan keamanan. Kerja sama bertujuan untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan global.⁸

Beberapa contoh perwujudannya adalah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia yang resmi dimulai sejak 25 Januari 1950. Hingga tahun 2025, hubungan baik 75 tahun keduanya melahirkan banyak pencapaian yang

⁵ Presiden Tentang Kebijakan, “Kebijakan-Dan-Strategi-Daerah-Pengelolaan-Sampah-Rumah-Tangga-Dan-Sampah-Sejenis-Sampah-Rumah-Tangga27.Pdf,” 2017.

⁶ PP17, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut,” *Demographic Research*, 2018, 4–7.

⁷ Tenri Anisabella Ulfadhillah, “Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Denmark Dalam Proyek Pengelolaan Sampah Environmental Support Programme Phase 3 (ESP-3) Di Kota Semarang Tahun 2017-2018,” 2021.

⁸ Kate O’Neill, Jörg Balsiger, and Stacy D. VanDeveer, “Actors, Norms, and Impact: Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate,” *Annual Review of Political Science* 7, no. June 2014 (2004): 149–75, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.7.090803.161821>.

menunjukkan kedekatan hubungan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, lingkungan, kelautan, pendidikan, serta sosial dan budaya. Salah satu kerja sama yang paling gencar dilakukan adalah di bidang lingkungan.⁹ Norwegia sendiri terkenal sebagai negara yang sangat memperhatikan lingkungan dan merupakan negara ter hijau di Eropa.

Norwegia juga memiliki skor energi terbarukan tertinggi kedua di dunia yang berhasil dengan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 98% dari kebutuhan energi nasional.¹⁰ Sebagai negara maju, Norwegia terus menunjukkan dukungannya terhadap penanganan permasalahan ekologi baik di dalam negeri maupun global. Pemerintahnya secara aktif terlibat dalam diskusi lingkungan hidup internasional dan memperkuat statusnya di forum tersebut melalui kontribusi keuangan dan konsultasi.

Norwegia dikenal dengan sistem pengelolaan sampahnya yang komprehensif, solusi teknologi yang canggih, serta peran utamanya dalam memerangi sampah. Oleh karena itu, perusahaan dan investor Norwegia memiliki posisi yang tepat untuk menjadi mitra strategis dalam pergeseran Indonesia menuju ekonomi sirkular. Sebagai bagian dari diplomasi lingkungan hidup Norwegia untuk menjadi pemimpin lingkungan hidup global, Norwegia secara aktif menawarkan

⁹ Kemenlu RI, “Duta Besar RI Oslo Ajak Norwegia Untuk Tingkatkan Kerja Sama Dengan Indonesia,” 2019, <https://kemlu.go.id/oslo/id/news/2002/duta-besar-ri-oslo-ajak-norwegia-untuk-tingkatkan-kerja-sama-dengan-indonesia>.

¹⁰ Kiki Apriliyanti and Darlin Rizki, “Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia Dan Norwegia Dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 186–209, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.36843246>.

kemitraan kepada negara-negara berkembang yang mempunyai permasalahan lingkungan, termasuk kepada Indonesia.¹¹

Salah satu contoh yang mencolok adalah kerja sama strategis dengan Banyuwangi, sebuah kabupaten berkembang di Indonesia yang gigih mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mencatat pada tahun 2023, Sampah bisa menjadi salah satu kunci masalah, karena dampaknya mencakup seluruh lingkungan, termasuk darat, laut, dan udara. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan tahun 2023, potensi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi mencapai 836.47 ton per harinya dan mencapai 305,312.85 ton per tahunnya.

Dari total produksi sampah, 66% diantaranya adalah sampah organik dan 33% lainnya sampah anorganik. Sampah mencakup sisa makanan, daun, kayu, dan limbah pertanian. Sementara di kategori sampah anorganik didominasi oleh sampah dengan capaian plastik (45%), kertas (19%), beling/kaca (4%), dan logam (4%), sampah lainnya yang sulit terurai (28%).¹²

Isu lingkungan yang kini dihadapi Banyuwangi semakin mendesak, akibat kurangnya strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan komprehensif yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta sektor pariwisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

¹¹ KLHK, “Kerjasama Baru Indonesia – Norwegia Pada Pengurangan Emisi GRK Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya,” n.d., [https://doi.org/Nomor: SP.256/HUMAS/PIIP/HMS.3/09/2022](https://doi.org/Nomor:SP.256/HUMAS/PIIP/HMS.3/09/2022).

¹² CLOCC, “CLOCC Finds That 78% of Waste in Banyuwangi Is Unmanaged,” 2022, <https://www.cloccglobal.org/post/clocc-finds-that-78-of-waste-in-banyuwangi-is-unmanaged>.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh dalam membahas tentang **kerja sama pengelolaan sampah plastik low-value di Banyuwangi dengan Norwegia**, hal inipun menjadi salah satu karakteristik dari penelitian, yang mana belum banyak yang meneliti dalam kerangka praktik paradiplomasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan pemaparan masalah di latar belakang yang telah dituliskan, penulis ingin lebih lanjut untuk membahas “**Bagaimana Upaya Pemerintah Banyuwangi dalam Kerja Sama Pengelolaan Sampah Plastik *Low-Value* dan Norwegia**”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk, aktor, dan strategi kerja sama antara Kabupaten Banyuwangi dan Norwegia dalam menangani sampah plastik *low-value*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan dalam berbagai macam proyek kalaborasi serta dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program kerja sama antara Kabupaten Banyuwangi dengan Norwegia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan, manfaat tersebut yaitu dalam bidang akademis dan praktis, dimana keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat secara akademis untuk dapat menambah wawasan baru serta pengetahuan, khususnya mengenai paradiplomasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu membantu bidang keilmuan dengan menjadi sumber referensi dan riset akan penelitian di masa mendatang dalam konteks yang relevan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman untuk penulis sendiri dan pembaca yang juga ingin memahami perihal paradiplomasi. Melihat praktik paradiplomasi menjadi hal yang cukup membawa dampak yang baik untuk menjadi solusi atas suatu masalah dan mencapai kepentingan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang berguna untuk mencari pembaruan dalam penulisan ini dengan bentuk kajian yang sama. Skripsi pertama berjudul **“Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Denmark dalam Proyek Pengelolaan Sampah Environmental Support Programme Phase 3 (ESP-3) di Kota Semarang Tahun**

2017-2018” oleh **Tenri Anisabella Ulfadhillah** pada tahun 2021. Berangkat dari program *7 Pilot Project* yang diusung oleh Pemerintah Pusat, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang terpilih, dan bertanggung jawab dalam memilih investor dan aktor yang berperan dalam pelaksanaannya. Melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), Denmark berperan sebagai pemberi hibah sejumlah 45 milyar rupiah dan memberikan bantuan fasilitas untuk Indonesia dalam pembuatan regulasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan pembangkit listrik.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan kerja sama Indonesia-Denmark dalam proyek pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Menggunakan Konsep Efektivitas Rezim oleh Arild Underal, penulis mengidentifikasi variabel dependen, independen, dan intervening yang mencakup output, outcome, dan impact. Dua indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas adalah perubahan perilaku dan teknis optimum. Dengan selesainya proyek dan penyaluran energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di TPA Jatibarang, dapat disimpulkan bahwa proyek ini cukup efektif.

Penelitian diatas digunakan sebagai penelitian terdahulu karena penulis merasa bahwa dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus kerja sama antar kedua negara, yakni dalam bidang pengelolaan limbah sampah. Persamaan lain yakni adalah Denmark dan Norwegia yang sama-sama negara Nordic dan penganut konsep *Scandinavian model of welfare state* yang dicirikan dengan peran sosial negara yang besar serta bekerja diatas prinsip-prinsip

¹³ Tenri Anisabella Ulfadhillah, “Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Denmark Dalam Proyek Pengelolaan Sampah Environmental Support Programme Phase 3 (ESP-3) Di Kota Semarang Tahun 2017-2018.”

solidaritas, kesetaraan dan universalisme. Sedangkan perbedaannya ada pada rumusan masalah dimana penelitian ini cenderung berfokus pada keefektivitasan kerja sama anatar kedua negara.

Selanjutnya penelitian kedua yang diambil dari jurnal berjudul **“Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Tahun 2012-2023”** oleh **Zacky Alifirano Pandana** yang ditulis pada 2024, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai kerja sama kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Kitakyushu dalam pengelolaan sampah selama periode 2012–2023 telah melahirkan berbagai inisiatif, seperti program daur ulang, pembangunan fasilitas pengolahan sampah Super Depo Suterejo, pendirian Rumah Kompos Wonorejo, operasional PDU Jambangan, pelestarian hutan mangrove, serta pengolahan sampah menjadi sumber energi. (WtE) di TPA Benowo.¹⁴

Penelitian ini membahas output dan outcome dari kerja sama kedua belah pihak dalam bidang lingkungan menggunakan konsep sister city dan paradiplomasi. Meski sudah memberikan hasil nyata dengan sistem 3R dan metode Takakura, masih diperlukan perbaikan dan evaluasi. Hasil program Green Sister City belum signifikan dalam mengatasi sampah akibat outcome yang kurang optimal, disebabkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk cepat dan urbanisasi yang meningkat. Penelitian ini berguna sebagai referensi karena sama-sama menjawab isu lingkungan, terutama pengelolaan limbah sampah. Fokus penelitian ini lebih

¹⁴ Zacky Alifirano Pandana and Praja Firdaus Nuryananda, “Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dan Kota Kitakyushu Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Tahun 2012-2023,” *Global Focus* 4, no. 1 (2024): 22–43, <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2024.004.01.2>.

pada penanganan isu lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang efektif, tetapi praktiknya belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya penelitian ketiga yang diambil dari skripsi yang berjudul **“Tantangan Paradiplomasi Bandung-Kawasaki dalam Proyek Pengelolaan Sampah di Kota Bandung 2016-2020”** oleh **Dennis Tiana Dinasela** yang ditulis pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi paradiplomasi Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam proyek *“Waste Management Support Project Toward a Sustainable Resource Recycling Society in Bandung, Indonesia”*, meskipun praktik paradiplomasinya berjalan dengan cukup baik, output yang dihasilkan dari kerja sama tersebut masih kurang maksimal sebab belum adanya hasil yang signifikan dalam pengurangan sampah yang disebabkan karena berbagai macam faktor.¹⁵

Penelitian ini membahas tantangan paradiplomasi yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam proyek pengelolaan sampah antara tahun 2017–2020. Tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya keuangan, dampak pandemi COVID-19, dan kurang optimalnya peran pemangku kepentingan, yang mengakibatkan masalah sampah belum teratasi secara tuntas. Penulis tertarik pada topik ini karena relevansinya dengan isu pengelolaan sampah dan penerapan konsep *Integrated Sustainable Waste Management*, yang dapat membantu mengurangi jumlah sampah jika diterapkan dengan prioritas yang tepat. Namun,

¹⁵ Dennis Tiana Dinasela, “Tantangan Paradiplomasi Bandung-Kawasaki Dalam Proyek Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung 2016-2020” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

penelitian ini lebih fokus pada tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung, dibandingkan dengan program dan implementasinya secara keseluruhan.

Penelitian keempat yang menjadi acuan penulis adalah jurnal yang berjudul **“Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris”** oleh Hendar yang dotulis pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus memaparkan diplomasi lingkungan Indonesia dalam penanganan sampah plastik laut melalui ASEAN. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ditingkat regional, Indonesia menjadi penyusunan *Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris* melalui KTT *East Asia Summit* (EAS) di Bali pada September 2017. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi lingkungan untuk memaparkan upaya diplomasi Indonesia melalui ASEAN dalam menangani *marine plastic debris*.¹⁶

Penelitian ini mendeskripsikan diplomasi lingkungan yang dilakukan Indonesia-ASEAN melalui enam tahap, mulai dari pencetusan, definisi masalah, pernyataan posisi awal, penyusunan formula, perundingan akhir, dan implementasi. ASEAN kemudian menerbitkan Rencana Aksi Regional untuk Memerangi Sampah Laut pada Mei 2021, sebagai strategi bersama untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik laut. Rencana ini mencakup 14 tindakan regional selama lima tahun (2021-2025) dengan empat pilar utama: dukungan kebijakan, penelitian dan inovasi, kesadaran publik, serta keterlibatan sektor swasta. Penulis tertarik pada penelitian ini karena fokus yang sama mengenai masalah sampah laut.

¹⁶ Hendar Hendar, Teuku Rezasyah, and Deasy Silvy Sari, “Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN Dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris,” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (2022): 201, <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>.

Selanjutnya, penelitian kelima yang menjadi acuan penulis adalah jurnal berjudul **“Kerjasama Jepang-ASEAN Dalam Mengurangi Marine Plastic Debris ASEAN di Kawasan Indo Pasifik”** oleh **Rifky Alif Puspita** yang ditulis pada tahun 2023. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Permasalahan sampah plastik laut saat ini jauh lebih kompleks, mencakup aspek lingkungan, hingga ekonomi dan maritim. Kerja sama Jepang dan ASEAN terwujud dalam beberapa program untuk mendorong pengamanan lingkungan lautan dari tumpukan sampah plastik. Ini dilakukan karena kebersihan lautan Indo Pasifik penting untuk kepentingan Jepang dan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bentuk Kerja sama Jepang dan ASEAN dalam mengurangi sampah laut di Indo Pasifik.¹⁷

Penelitian ini menggunakan Teori Regional Security Complex, yang menyatakan bahwa kedekatan geografis dan kondisi domestik suatu negara mempengaruhi keamanan kawasan. Selain itu, teori keamanan lingkungan menekankan perlindungan lautan dan konservasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Jepang dan ASEAN dalam pengurangan sampah laut di Indo-Pasifik, bagian dari inisiatif Japan Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo Pacific, mencakup pelatihan pengelolaan limbah dan aksi bersama UNEP. Kerja sama ini penting untuk mengurangi sampah laut di Asia Tenggara dengan pendekatan multi-generasi. Jepang berperan sebagai aktor keamanan yang signifikan, menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan AOIP.

¹⁷ Rifky Alif Puspita and Megahnanda Alidyan Kresnawati, “Kerjasama Jepang-Asean Dalam Mengurangi Marine Plastic Debris Asean Di Kawasan Indo Pasifik,” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2023): 104, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.49753>.

Penulis tertarik pada fokus penelitian ini yang menjelaskan program-program yang dilakukan dan manfaat kebersihan laut bagi kedua pihak.

Dan pada penelitian keenam yang menjadi permasalahan case yang sama adalah, **Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)** oleh Ari Asmono dan Hari Prastiyo yang ditulis pada tahun 2023 membahas kebijakan otonomi daerah dalam kerangka kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Studi ini mengeksplorasi kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu di Jepang dalam konteks program *sister city*.

Kerja sama antara Kota Kitakyushu dan Surabaya difokuskan pada pengelolaan sampah dan limbah, di mana Kitakyushu memberikan dukungan teknologi dan bantuan untuk menangani masalah persampahan melalui program pengolahan limbah ramah lingkungan. Kesepakatan ini diformalkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang merujuk pada hukum nasional masing-masing negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan Kota Surabaya untuk menjalin kerja sama internasional, termasuk *sister city*, berdasarkan Pasal 363 UU Pemerintah Daerah, yang memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kerja sama internasional demi meningkatkan kesejahteraan¹⁸.

¹⁸ Ari Asmono and Hari Prastiyo, "Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2659–68, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5108/http>.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisis	Hasil
1	Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Denmark dalam Proyek Pengelolaan Sampah Environmental Support Programme Phase 3 (ESP-3) di Kota Semarang Tahun 2017-2018 Oleh: Tenri Anisabella Ulfadhillah	Konsep Efektivitas Rezim	Dalam penelitian ini, dengan menggunakan konsep efektivitas rezim, ditemukan tiga elemen: output, outcome, dan impact. Pada tahun 2018, proyek ini berhasil melahirkan PLTS yang dapat mengurangi limbah dan menghasilkan listrik. Dampak proyek ini mencakup perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan konversi limbah menjadi sumber energi berkelanjutan. Dengan penyaluran energi listrik yang dapat digunakan masyarakat melalui PLTS di TPA Jatibarang, Kota Semarang, kerja sama ini terbukti berhasil dan efektif dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan lingkungan.
2	Kerjasama <i>Sister City</i> Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Tahun 2012-2023 Oleh: Zacky Alifirano Pandana	Teori Paradiplomasi dan Konsep <i>Sister City</i>	Kerja sama <i>sister city</i> telah menghasilkan program untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan teknologi sederhana dan murah dengan penerapan metode Takakura. Penelitian menunjukkan bahwa masalah sampah di Surabaya masih signifikan meski kerja sama ini telah berlangsung satu dekade dan menunjukkan hasil positif, seperti penurunan jumlah sampah harian. Meskipun kerja sama ini dianggap efektif, masih perlu perbaikan untuk mengatasi tantangan yang ada.
3	Tantangan Paradiplomasi Bandung-Kawasaki dalam Proyek	Konsep Keamanan Lingkungan, Paradiplomasi, <i>Integrated</i>	Paradiplomasi antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki telah meningkatkan regulasi dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Meskipun

	<p>Pengelolaan Sampah di Kota Bandung 2016-2020 Oleh: Dennis Tiana Dinasela</p>	<p><i>Sustainable Waste Management</i> (ISWM)</p>	<p>ada hasil positif, tantangan signifikan tetap perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Kerja sama ini menunjukkan potensi sebagai strategi efektif, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya dan optimalisasi sektor pemangku kepentingan.</p>
4	<p>Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris Oleh: Hendar</p>	<p>Konsep Diplomasi Lingkungan</p>	<p>Hasilnya, ASEAN meluncurkan Rencana Aksi Regional untuk Memerangi Sampah Laut berisi 14 tindakan untuk mengatasi polusi plastik laut selama lima tahun ke depan (2021-2025). Rencana ini terstruktur dalam tiga tahap utama: mengurangi masukan ke dalam sistem, meningkatkan pengumpulan dan meminimalkan kebocoran, serta menciptakan nilai untuk penggunaan kembali sampah. Rencana ini didukung oleh empat pilar: dukungan kebijakan, penelitian dan inovasi, kesadaran publik, serta keterlibatan sektor swasta.</p>
5	<p>Kerjasama Jepang-ASEAN Dalam Mengurangi Marine Plastic Debris ASEAN di Kawasan Indo Pasifik Oleh: Rifky Alif Puspita</p>	<p>Teori Regional Security Complex</p>	<p>Kerja sama ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan generasi untuk mencapai keamanan lingkungan laut. Jepang memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk menyinergikan visi Indo-Pasifik bersama ASEAN, memastikan tujuan AOIP terlaksana dengan baik. Jepang muncul sebagai aktor keamanan penting dalam regionalisme Indo-Pasifik, menunjukkan upaya mencapai keamanan kawasan melalui berbagai program dan pendekatan kolaboratif dengan ASEAN</p>
6.	<p>Kewenangan Pemerintah Kota</p>	<p>Kebijakan Otonomi Daerah</p>	<p>Penelitian ini menekankan bahwa kerja sama antar kota</p>

	<p>Surabaya Dalam Kerja Sama <i>Sister City</i> (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang) oleh Ari Asmono dan Hari Prastiyo</p>	<p>dalam Kerjasama Internasional dalam Konteks <i>Sister City</i></p>	<p>dalam konteks ini adalah bagian dari upaya desentralisasi kekuasaan yang diperoleh melalui otonomi daerah. Program kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas Kota Surabaya dalam mengelola limbah dan lingkungan hidup, dengan bantuan teknologi dari Kitakyushu. Kerja sama ini juga memperkuat inisiatif lingkungan, seperti pengolahan sampah dan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.</p>
--	---	---	--

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Paradiplomasi

Kajian paradiplomasi bisa dikatakan kajian yang relatif baru dalam bidang hubungan internasional, secara singkat, paradiplomasi adalah kapabilitas suatu entitas “*sub-state*”, dalam melakukan hubungan luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan mereka secara spesifik.¹⁹ Panayotis Soldatos pertama kali memperkenalkan kan istilah “*paradiplomacy*” pada tahun 1980-an, mengubah istilah “*parallel diplomacy*” menjadi “*paradiplomacy*”, yang mengacu pada arti “*the foreign policy of non-central governments*”.²⁰ Paradiplomasi merujuk pada keterlibatan, kerja sama, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah non-pusat dalam menjalin hubungan dengan aktor-

¹⁹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal Di Fora Internasional (Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora)*, 2015.

²⁰ Stefan Wolff, University of Nottingham, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, n.d.

aktor internasional, seperti negara lain, pemerintah daerah asing, perusahaan multinasional, organisasi internasional, serta lembaga masyarakat sipil.

Fenomena paradiplomasi juga telah berkembang di Indonesia. Tidak sedikit daerah otonom, seperti pemda provinsi, kabupaten, atau kota yang aktif menjalin kerja sama luar negeri dengan negara lain yang dituangkan kedalam perjanjian internasional seperti “*Memorandum of Understanding*” atau “*Letter of Intent*”²¹ Melalui paradiplomasi, negara bisa mendapatkan manfaat berupa ekspansi pasar lokal ke tingkat global, peningkatan investasi asing, solusi inovatif, dan pengalaman internasional bagi daerah yang melakukan praktik paradiplomasi. Selain itu, pengembangan daerah juga dapat terbantu melalui kerja sama internasional dengan daerah dari negara lainnya dalam bidang pariwisata, lingkungan, atau ekonomi.

Paradiplomasi menjadi kesempatan untuk pemerintah daerah dan pihak luar negeri dalam berinteraksi, mempromosikan potensi daerah dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan serta keinginan yang saling menguntungkan. Dengan hadirnya paradiplomasi, pemerintahan daerah dituntut untuk mengubah arah kebijakannya pada beberapa aspek, yaitu: perubahan dari pemerintahan yang bersifat birokratis dan monopolistik menjadi pemerintahan yang bersifat kompetitif.²²

Pemerintah daerah memang memiliki peran utama sebagai agen paradiplomasi selaku pemangku kebijakan, serta memiliki kemampuan untuk

²¹ Takdir Ali Mukti, *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*, Agustus, 2 (Yogyakarta, 2020).

²² Laode Muhamad Fathun, “Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar,” *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (2016): 75–94, <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10430>.

mengembangkan dan menerapkan strategi paradiplomasi yang efektif. Namun, keberhasilan praktik paradiplomasi juga tak lepas dari peran dan kontribusi aktor lain. Keterlibatan LSM, NGO, Organisasi Internasional, dan aktor korporasi internasional dapat memperkaya lanskap strategis dan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam praktik paradiplomasi.²³

Sebagai bentuk pemberian landasan hukum untuk pengimplementasian kerja sama pemerintah daerah dan pihak luar negeri, sejumlah peraturan perundang-undangan telah diterbitkan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018²⁴, Peraturan tersebut mengatur bahwa bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). KSDPL mencakup kerja sama *Sister City* atau kota kembar/bersaudara pada berbagai tingkatan pemerintahan. Sementara itu, KSDLL meliputi kerja sama yang merupakan kelanjutan dari inisiatif Pemerintah Pusat, seperti dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum asing, serta mitra pembangunan dari luar negeri²⁵.

Dalam cakupan paradiplomasi, keterkaitan isu internasional tentang lingkungan, Norwegia, Indonesia, dan Banyuwangi dapat ditarik suatu benang

²³ Fathun.

²⁴ Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri," *Public Corner* 1, no. 1 (2021): 2–5.

²⁵ BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, "Kerja Sama Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah," 2020, 1–8, https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/TULISAN-HUKUM_pp-28_2018_kerja-sama-daerah_Kor-Binbangkum-15012020.pdf.

merah. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang masih bersikukuh dengan berbagai permasalahan lingkungan. Sedangkan disisi lain Norwegia dan komitmennya terhadap keberlanjutan sangat tertanam dalam budaya dan politiknya dan dianggap sebagai pemimpin dunia dalam penggunaan energi terbarukan. Dalam hal ini, Kabupaten Banyuwangi menjadi sasaran tepat bagi Norwegia.

Jika dilihat dari bentuknya, maka kerja sama yang dilakukan Banyuwangi dengan Norwegia masuk ke dalam kategori KSDLL karena merupakan kerja sama atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat. Sebelumnya, Indonesia dan Norwegia menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait inisiatif lingkungan dan iklim yang telah membuka jalan bagi Norwegia untuk memberikan dukungan bagi rencana *Net Sink* 2030 untuk Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) Indonesia²⁶. Dari situ kerja sama dengan Norwegia meluas ke tingkat yang lebih jauh.

Penulis menggunakan konsep paradiplomasi karena kerja sama ini tetap berada di bawah kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia, namun pelaksanaannya tetap dijalankan secara langsung oleh aktor di tingkat daerah guna menangani permasalahan dan mewujudkan kepentingan. Pengaplikasian pendekatan paradiplomasi juga digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi bagaimana praktik kerja sama yang dilaksanakan Kabupaten Banyuwangi dan Norwegia dalam mengentaskan permasalahan lingkungan,

²⁶ NICFI, "Contribution Agreement Concluded: Norway Delivers US\$ 56 Million In Results-Based Support For Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Climate Goals," n.d., <https://www.nicfi.no/2022/10/19/contribution-agreement-concluded-norway-delivers-us-56-million-in-results-based-support-for-indonesias-folu-net-sink-2030-climate-goals/>.

lebih khususnya permasalahan pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2024 (*ongoing*).

1.5.2 Sustainable Development Goals (SDGs) 12 & 14

Sustainable Development Goals (SDGs) dibuat dan disepakati oleh negara anggota forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang resmi diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan dunia dan gerakan bersama untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, serta memastikan semua manusia hidup dengan aman, layak, dan sejahtera pada tahun 2030. SDGs lahir dari proses partisipatif, transparan, dan inklusif, melibatkan seluruh suara pemangku kepentingan dan masyarakat.²⁷

SDGs adalah visi global untuk keadaan dunia pada tahun 2030, dengan prinsip utamanya yakni universalitas, namun tetap dengan memperhatikan kondisi nasional, kapasitas, dan tingkat pembangunan yang beragam, serta menghargai kebijakan dan prioritas tiap-tiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan SDGs karena agenda ini merupakan visi pembangunan jangka panjang yang sudah dijalankan di Indonesia. Salah satu yang mejadi prioritas Indonesia dalam Agenda SDGs 2030 adalah permasalahan lingkungan, terlebih lagi masalah sampah, baik yang di daratan maupun di lautan.²⁸

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, Indonesia terus mengambil langkah-langkah strategis dalam

²⁷ S D G Youth and Summer Camp, "The 2030 Agenda for Sustainable Development's 17 Sustainable Development Goals (SDGs)," n.d.

²⁸ Youth and Camp.

mendukung pencapaian SDG 12 “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab”. Tujuan ini menitikberatkan pentingnya menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di tingkat global, dengan menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan. Gagasan ini berkaitan erat dengan isu pengelolaan sampah, yang tidak hanya bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong peningkatan nilai tambah dari limbah tersebut.²⁹

Tak hanya di daratan, sampah plastik di laut Indonesia menempati peringkat kedua di dunia.³⁰ Masalah ini sejalan dengan target SDG 14 “Menjaga Ekosistem Laut”. Target tersebut mencakup upaya mengatasi dampak merugikan guna menciptakan laut yang sehat dan produktif, serta konservasi setidaknya 10% wilayah pesisir. Sementara itu, pada tahun 2025, targetnya adalah mengurangi polusi laut termasuk sampah plastik, menghindari serta secara signifikan menurunkan berbagai bentuk pencemaran laut, termasuk limbah laut dan polusi akibat zat hara berlebih. Target lainnya juga mencakup terciptanya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara *sustainable* guna menghindari dampak negatif yang signifikan, serta mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

²⁹ Universitas Brawijaya, “Sustainable Development Goals Center Universitas Brawijaya,” n.d., <https://sdgs.ub.ac.id/sdgs-center-ub/>.

³⁰ RRI, “Indonesia Penghasil Sampah Kelaut Terbesar Kedua Di Dunia,” 2024, <https://www.rri.co.id/lain-lain/723549/indonesia-penghasil-sampah-kelaut-terbesar-kedua-di-dunia#:~:text=kedua setelah China.-,Indonesia punya prestasi yang buruk dalam hal pencemaran laut.,plastik terbesar kedua setelah China.>

Partisipasi Indonesia dalam SDGs bukan semata-mata hanya mengikuti agenda pembangunan berkelanjutan global, namun juga memiliki kesesuaian dengan tantangan pembangunan di negara ini. Artinya, komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs lebih didorong oleh kepentingan nasional untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekedar memenuhi kesepakatan global.³¹

Banyuwangi telah memanfaatkan berbagai kolaborasi dengan lembaga-lembaga, baik nasional maupun internasional untuk memperkuat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan inovasi teknologi, seperti daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efisien, Banyuwangi terus berupaya agar program-program lingkungan ini sejalan dengan target SDGs. Secara keseluruhan, keterkaitan antara Banyuwangi, lingkungan, pengelolaan sampah, dan SDGs adalah bagian dari upaya holistik untuk membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, menjaga ekosistem, dan mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif terkait suatu

³¹ Youth and Camp, “The 2030 Agenda for Sustainable Development’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs).”

fenomena.³² Metode ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara rinci mengenai interaksi antara pemerintah subnasional dan aktor internasional. Penulis menggunakan metode deskriptif ini guna mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah plastik *low-value* melalui kerja sama dengan Norwegia

1.6.2 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Penggunaan analisis kualitatif bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengklarifikasi jawaban atas pertanyaan penelitian dengan struktur yang tepat. Analisis kualitatif ini sangat relevan digunakan dalam studi mengenai upaya Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan sampah plastik *low-value* melalui kerja sama dengan Norwegia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian yang ini adalah teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku, majalah, serta artikel yang terdapat di internet yang linier atau memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Oleh sebab itu, data yang dimiliki oleh penulis merupakan data yang bersifat sekunder.

³² Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D* (Alfabeta, 2013).

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah bekerja sama dengan Norwegia dalam upaya pengelolaan sampah plastik sejak tahun 2018 dan kerja sama ini masih berlangsung hingga sekarang (*ongoing*). Namun, progres terakhir dari rangkaian kerja sama ini ada di tahun 2024. Oleh karena itu, batasan materi untuk penelitian ini mulai tahun 2018 hingga 2024 untuk melihat realisasi implementasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Norwegia.

1.6.4.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada implementasi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Norwegia dalam upaya pengelolaan sampah plastik *low-value* di Banyuwangi. Penelitian ini akan dikaji menggunakan konsep paradiplomasi dan SDGs

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan pada analisa sementara, kerja sama antara Kabupaten Banyuwangi dan Norwegia melalui pendekatan paradiplomasi dan SDGs merupakan langkah penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peluncuran masterplan pengelolaan sampah yang diumumkan pada awal 2024, hasil kolaborasi dengan Avfall Norge dan InSWA, menjadi tonggak dalam perencanaan jangka panjang yang pertama di Indonesia. Masterplan ini dirancang untuk mengatasi masalah sampah selama 20 tahun ke depan, dengan fokus pada pengelolaan sampah plastik *low-value*, peningkatan kesehatan lingkungan, serta

dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi, mendukung proyek ini, yang mencakup penyediaan infrastruktur seperti TPS3R dan TPA, dengan dukungan regulasi dan pendanaan yang tepat.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	ISI
<p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praksis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Teori Paradiplomasi 1.5.2 Sustainable Development Goals 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Batasan Waktu 1.6.5 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p style="text-align: center;">BAB II DINAMIKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI</p>	<p>2.1 Kondisi Sosial Banyuwangi 2.2 Pertumbuhan Industri di Banyuwangi 2.2.1 Industri Ekstraktif 2.2.2 Industri Fasilitatif 2.2.3 Masalah Industri 2.2.4 Masalah Pariwisata 2.3 Masalah Lingkungan di Banyuwangi 2.3.1 Masalah Sampah</p>

	2.4 Tata Kelola Pembuangan di Banyuwangi 2.5 Avfall Norge
BAB III IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM KERANGKA PARADIPLOMASI DAN KONTRIBUSI TERHADAP SDGs 12 & 14	3.1 Implementasi Kerja Sama Banyuwangi dan Norwegia dalam Kerangka Paradiplomasi Kerangka Paradiplomasi 3.1.1 CLOCC 3.1.2 Inframar 3.2 Kontribusi Kerja Sama Terhadap Pencapaian Target SDGs 3.2.1 SDG 12: <i>Responsible Consumption and Production</i> 3.2.2 SDG 14: <i>Live Below Water</i>
BAB IV ANALISA	Analisa Dinamika Lingkungan Banyuwangi dalam Kerja Sama Paradiplomasi dengan Norwegia untuk Mendukung SDGs 12&14
BAB V PENUTUP	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

